

Ruang Lingkup Perencanaan Wilayah

Ir. Bagdja Muljarjadi, S.E., M.E.



PENDAHULUAN

Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dapat dicapai melalui perwujudan sasaran-sasaran tertentu (yang biasa disebut sebagai tujuan antara), yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan baik oleh pribadi sendiri maupun oleh suatu organisasi tertentu. Perencanaan diperlukan agar alokasi menjadi lebih efisien dan efektif, dengan maksud agar keadaan di masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Di dalam pengertian perencanaan tersebut terkandung beberapa pengertian yang tersembunyi, diantaranya berikut ini.

1. Pada suatu perencanaan harus terkandung suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu hasil akhir yang diharapkan.
2. Perlu disadari bahwa proses pencapaian tujuan akhir tersebut memerlukan waktu tertentu untuk mewujudkannya. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan beberapa sasaran sebagai tahapan-tahapan dari pencapaian tujuan akhir yang diharapkan.
3. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 2 bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan rentang waktu tertentu untuk mencapainya, oleh karena itu setiap perencanaan selalu dapat dikaitkan dengan selang waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan maka perwujudannya dapat berbentuk *pengaturan* dan *pengontrolan* terhadap hubungan atau tindakan-tindakan antara pemerintah dengan sistem pasar. Perkembangan kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah (*public sector*) maupun swasta (*private sector*), menimbulkan kebutuhan akan pengaturan dan pengontrolan kegiatan-kegiatan tersebut. Pengontrolan merupakan cara untuk mempengaruhi kekuatan pasar (*market forces*) sebagai alat utama terjadinya pembangunan. Pemerintah harus terus menerus mencoba, pada berbagai tingkat dan derajat tertentu, mengatur dan mengarahkan pembangunan sehingga dapat

Secara lebih rinci, Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. konsep-konsep dan pengertian perencanaan wilayah;
2. peranan keilmuan lain dalam perencanaan wilayah;
3. pengertian dan contoh wilayah homogen;
4. pengertian dan contoh wilayah nodal;
5. pengertian dan contoh wilayah perencanaan/administratif;
6. perbedaan antara wilayah dengan nasional dari sisi:
 - a. derajat keterbukaannya (*degree of openness*);
 - b. variabel-variabel makro yang tidak berlaku dalam analisis wilayah;
 - c. perbedaan neraca-neraca pendukung analisis wilayah dengan nasional.

Keseluruhan materi dalam modul ini dikelompokkan menjadi 3 kegiatan belajar, yaitu

Kegiatan Belajar 1: Konsep Perencanaan Wilayah

Kegiatan Belajar 2: Klasifikasi Wilayah

Kegiatan Belajar 3: Analisis Nasional vs Analisis Wilayah

KEGIATAN BELAJAR 1

Konsep Perencanaan Wilayah

Berdasarkan UU No. 26/2007 tentang penataan ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa batas-batas dari suatu wilayah bisa ditentukan secara pasti berdasarkan suatu peraturan, atau sebaliknya sulit ditentukan karena menyangkut keterkaitan aktivitas ekonomi dari masyarakatnya.

A. PENGERTIAN DAN DEFINISI PERENCANAAN WILAYAH

Pada dasarnya perencanaan wilayah juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan perencanaan pembangunan pada umumnya, hanya saja perencanaan wilayah dikaitkan dengan suatu daerah tertentu. Berdasarkan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan perencanaan wilayah terkait dengan penataan ruang wilayah, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (UU No. 26/2007 Pasal 3).

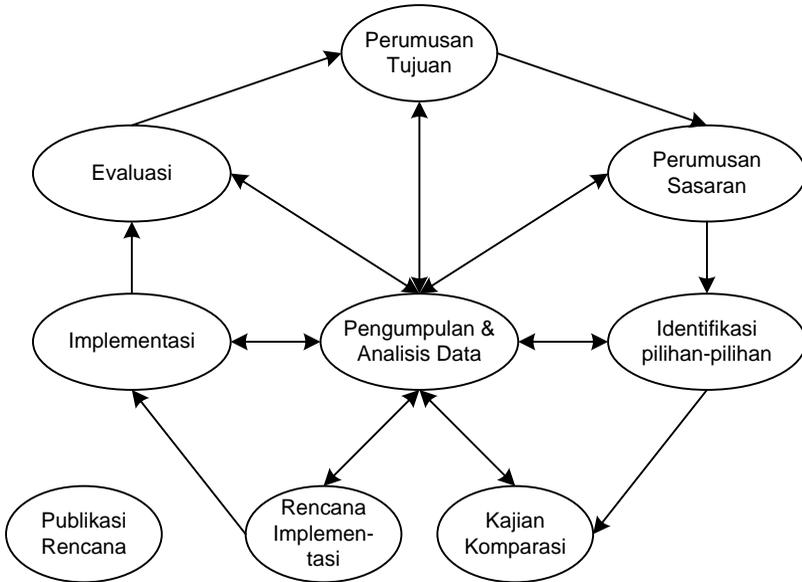
Menurut Friedman (1967) perencanaan wilayah adalah proses perumusan dan penegasan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi dalam berbagai kegiatan dalam ruang yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah kota (biasanya disebut dengan *supra-urban*). Nugroho dan Dahuri (2004) mengartikan perencanaan pembangunan wilayah sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Dalam pengertian tersebut tergambar bahwa perencanaan wilayah biasanya selalu terkait dengan tujuan-tujuan sosial, seperti

perkembangan penduduk, kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat, keamanan, akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, serta permasalahan ekonomi, seperti masalah pertumbuhan ekonomi, perluasan sektor industri dan jasa, peningkatan produktivitas sektor pertanian. Selain itu, berdasarkan ruang lingkup daerahnya perencanaan wilayah menyangkut wilayah yang lebih luas dari wilayah kota karena pada dasarnya kota merupakan salah satu bagian dari unsur wilayah, selain wilayah perdesaan. Aspek spatial juga merupakan satu pertimbangan penting bagi perencanaan wilayah karena pada dasarnya semua tujuan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya (seperti kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan) harus diletakkan dalam ruang.

Nugroho dan Dahuri (2004) juga menjelaskan bahwa terdapat empat maksud dari perencanaan pembangunan wilayah, yaitu

1. memberikan perlindungan sosial dan ekonomi karena adanya ketimpangan, kemiskinan, dan tekanan terhadap sumber daya alam;
2. sebagai media untuk terjadinya mekanisme pasar;
3. menyediakan perangkat bagi perencanaan pembangunan itu sendiri;
4. merupakan suatu upaya untuk membangun sistem kelembagaan yang lebih baik lagi.

Terkait dengan maksud perencanaan pembangunan wilayah sebagai suatu upaya menyediakan perangkat bagi perencanaan itu sendiri, berbagai upaya dilakukan agar rencana yang disusun dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari rencana tersebut. Oleh sebab itu, perlu disusun suatu rangkaian kegiatan yang dapat mengarah kepada kondisi tersebut. Bendavid-Val (1991) berupaya menyusun suatu rangkaian kegiatan yang diharapkan, apabila berjalan dengan semestinya, mampu menggambarkan rangkaian kegiatan dari suatu model perencanaan yang ideal (*Idealized Planning Model*) yang mampu mengantarkan rencana sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Secara skematis susunan model perencanaan yang ideal tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.1.



Sumber: Bendavid-Val, (1991)

Gambar 1.1.
Idealized Planning Model

Berdasarkan Gambar 1.1, terdapat tiga keistimewaan yang terkait dengan arti perencanaan sebagai suatu proses, yaitu

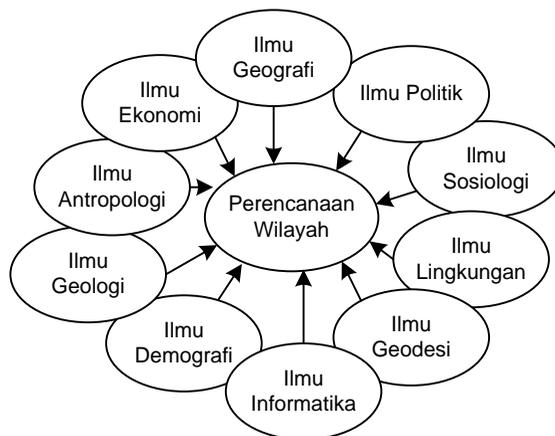
1. analisis dan pengumpulan data tidak merupakan suatu proses yang berurutan, tetapi suatu fungsi yang secara terus menerus mendukung semua kegiatan dan sekaligus menerima informasi dari kegiatan-kegiatan itu;
2. semua tahapan proses merupakan bagian dari suatu siklus yang saling berhubungan, di mana tujuan dan sasaran secara periodik ditetapkan dan dirumuskan kembali;
3. publikasi rencana bukan merupakan akhir dari proses, tetapi dapat dijalankan sewaktu-waktu bergantung kondisinya.

B. KETERKAITAN DENGAN BIDANG ILMU LAIN

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perencanaan wilayah memiliki sifat-sifat yang sama dengan perencanaan pembangunan yang bersifat

multidimensional. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa perencanaan wilayah akan memiliki cakupan yang luas baik cakupan ekonomi, cakupan geografi, cakupan sosial dan budaya, cakupan politik bahkan cakupan fisik sekalipun, seperti perencanaan penggunaan lahan, konservasi sumber daya alam, dan pengembangan lingkungan. Oleh sebab itu, bidang perencanaan wilayah akan memiliki saling keterkaitan dengan bidang-bidang keilmuan lainnya. Hal ini juga yang disadari oleh beberapa ahli di bidang masing-masing yang merasa tertarik pada permasalahan wilayah sehingga pada tanggal 27 Desember tahun 1954 di Amerika Serikat berkumpul 60 orang ilmuwan di bidang ekonomi, geografi, dan bidang sosial lainnya bersama-sama membentuk asosiasi yang dinamakan *Wilayah Science Assosiation* (Azis, 1987). Tujuan utama dari ilmu wilayah tersebut adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan memecahkan masalah sosial-ekonomi yang dikaitkan dengan dimensi ke ruangan (*spatial*) dan dimensi waktu yang berguna untuk membuat formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Semakin hari semakin banyak bidang keilmuan lain yang dirasa perlu untuk membuat suatu perencanaan wilayah yang baik, bahkan hingga saat ini ilmu informatika menjadi salah satu alat yang banyak digunakan untuk perencanaan di tingkat wilayah. Secara skematis penggambaran keterkaitan bidang keilmuan dalam perencanaan wilayah dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2.
Keterkaitan Bidang Keilmuan dalam Perencanaan Wilayah

Berdasarkan Gambar 1.2, jelas terlihat bahwa perencanaan wilayah merupakan aktivitas yang berdimensi jamak (*multidimension*), di dalamnya terkandung makna ekonomi, sosial-politik, fisik bahkan informasi. Ruang lingkup perencanaan yang cukup luas ini membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi terhadap masing-masing bidang keilmuan sehingga analisis yang dilakukan menjadi seimbang dan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. Berbagai tindakan antisipasi dapat disusun, yang pada akhirnya nanti mengarah kepada terciptanya tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang lebih cepat.

C. PENTINGNYA PERENCANAAN WILAYAH

Menurut Glasson (1974) ada beberapa faktor yang mengharuskan pemerintah harus ikut serta dalam perencanaan wilayah. Faktor-faktor tersebut biasanya didasarkan pada adanya perbedaan karakteristik antar masing-masing wilayah yang ada dalam wilayah nasional dan juga perbedaan fungsional dari masing-masing wilayah.

Adanya perbedaan karakteristik alam dari masing-masing daerah mengharuskan adanya perencanaan yang berbeda, seperti daerah yang berada di aliran sungai akan memiliki perencanaan wilayah yang berbeda dengan daerah-daerah yang berada di sepanjang garis pantai suatu samudra. Kedua hal tersebut merupakan suatu contoh dari perbedaan perencanaan masing-masing wilayah berdasarkan karakteristiknya. Begitu juga dengan perbedaan fungsinya. Wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas industri yang sangat pesat dengan pertumbuhan penduduk yang besar akan memiliki karakteristik perencanaan yang berbeda dengan wilayah-wilayah yang aktivitas utamanya adalah pertanian dengan perkembangan penduduk yang relatif kecil.

Suatu negara mungkin akan memiliki berbagai macam perbedaan karakteristik dan fungsional dari daerah-daerah yang dimilikinya. Hal itulah yang menyebabkan perlu adanya perencanaan wilayah karena akan sangat tidak mungkin apabila perencanaannya hanya didasarkan pada perencanaan nasional saja. Begitu juga dengan Indonesia, dengan karakteristik wilayah dan sosial yang berbeda-beda untuk masing-masing daerah yang ada di Indonesia maka peran perencanaan wilayah untuk pembangunan di Indonesia menjadi sangat penting karena pembangunan akan menjadi lebih dapat difokuskan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing wilayahnya.

Perencanaan wilayah dapat dipandang sebagai suatu perencanaan penghubung, yaitu suatu perencanaan yang menghubungkan antara perencanaan di tingkat nasional dengan perencanaan yang ada di tingkat lokal agar terjadi keselarasan antara tujuan-tujuan yang dibuat di tingkat nasional dengan tujuan-tujuan yang ada di tingkat masyarakat (lokal). Berdasarkan peranan tersebut maka ada dua hal utama yang hendak dituju dari perencanaan wilayah, yaitu

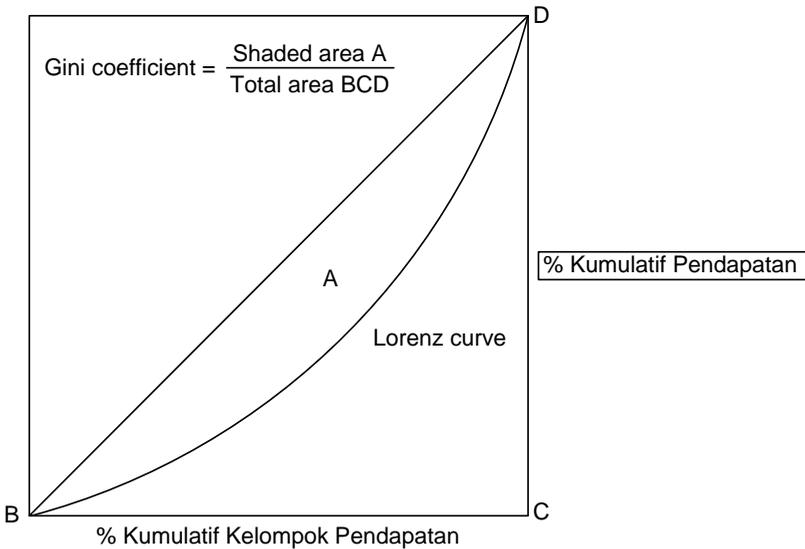
1. *Place Prosperity*, bagaimana agar terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah-wilayah yang ada di suatu negara, dan menghindari adanya ketimpangan yang berlebihan di antara *wilayah-wilayah* dalam suatu negara (*wilayah disparity*).

Ada beberapa ukuran untuk mengetahui seberapa besar terjadinya ketimpangan antar wilayah. Beberapa ukuran tersebut diantaranya adalah

- a. Indeks Williamson, yang tidak lain merupakan sebuah *coefficient of variation* dari suatu indikator kemajuan perekonomian daerah-daerah (biasanya diwakili oleh PDRB per kapita) yang menjadi wilayah penelitian.
 - b. Indeks Entropi Theil. Seperti juga Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil juga merupakan sebuah *coefficient of variation*. Perbedaannya adalah bahwa dalam indeks Entropi Theil kita bisa mendekomposisi komponen ketimpangannya menjadi dua bagian, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah (*within region disparity*) dan ketimpangan regional antarwilayah (*interregion disparity*). Selain itu dengan menggunakan indeks entropi Theil juga kita bisa mengetahui mengenai sumbangan (*share*) dari masing-masing daerah terhadap besarnya ketimpangan daerah secara keseluruhan.
2. *People Prosperity*, bagaimana agar terjadi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan antar individu (golongan pendapatan) yang ada dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Ukuran yang paling sering digunakan sebagai alat ukur menghitung ketimpangan (ketidakmerataan) antar golongan pendapatan adalah *indeks gini*. Perhitungan *indeks gini* didapatkan dari sebuah kurva yang disebut sebagai Kurva Lorenz, yang pada dasarnya mencoba untuk menjelaskan seberapa besar kelompok pendapatan menikmati hasil-hasil dari pembangunan (yang biasa diukur dengan pendapatan nasional). Semakin jauh jarak Kurva Lorenz dari garis pemerataan (*line of equality*) atau semakin besar luas kurva yang diarsir (luas kurva A) maka semakin besar

indeks gini, semakin tidak merata. Berdasarkan gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa semakin luas daerah A maka semakin timpang ketidakmerataan antar si kaya dan si miskin. Secara sederhana, Kurva Lorenz dapat digambarkan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3.
Kurva Lorenz Sebagai Dasar Perhitungan Indeks Gini

Bagaimana materi awal untuk mata kuliah ini? Cukup menarik bukan? Semoga Anda dapat memahami mengenai konsep perencanaan wilayah ini.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi yang telah diuraikan, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan makna dari perencanaan wilayah, bidang apa saja yang terkait dengan kegiatan tersebut!
- 2) Kemukakan hal terpenting - yang harus disediakan - dari semua aktivitas yang ada pada konsep proses perencanaan yang ideal!

- 3) Sebutkan paling sedikit 5 bidang keilmuan yang terkait dengan perencanaan wilayah, jelaskan pula peran masing-masing keilmuan tersebut dalam perencanaan wilayah!
- 4) Jelaskan mengapa perencanaan wilayah sangat penting bagi perencanaan nasional secara keseluruhan!
- 5) Sebutkan dua tujuan utama dari pelaksanaan perencanaan wilayah di suatu negara!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda baca kembali penjelasan yang ada pada bagian pengertian dan definisi perencanaan wilayah.
- 2) Lihat penjelasan dan gambar dari proses perencanaan ideal yang dikemukakan oleh Bendavid Val.
- 3) Lihat gambar tentang keterkaitan bidang keilmuan dalam perencanaan wilayah.
- 4) Baca kembali subbab tentang pentingnya perencanaan wilayah.
- 5) Lihat kembali tujuan utama yang hendak dicapai dari pelaksanaan perencanaan wilayah.



RANGKUMAN

Perencanaan pembangunan nasional menurut Dorojatun Kuntjoro Jakti (1985) pada dasarnya merupakan sebuah proses yang multidimensi di mana di dalamnya terkandung makna reorientasi dan reorganisasi dari sistem sosial dan sistem ekonomi secara keseluruhan pada skala nasional atau negara. Pada dasarnya, perencanaan wilayah juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan perencanaan pembangunan pada umumnya, hanya saja perencanaan wilayah dikaitkan dengan suatu daerah tertentu. Perencanaan wilayah adalah proses perumusan dan penegasan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi dalam berbagai kegiatan dalam ruang yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah kota.

Apabila sebuah perencanaan wilayah disusun dengan suatu rangkaian kegiatan yang benar dan semestinya maka perencanaan tersebut akan mampu mengantarkan rencana yang dibuat sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Perencanaan wilayah bersifat multidimensi, oleh sebab itu berbagai bidang keilmuan akan terkait dalam proses penyusunan rencana tersebut.

Perencanaan wilayah dapat dipandang sebagai suatu perencanaan penghubung, yaitu suatu perencanaan yang menghubungkan antara perencanaan di tingkat nasional dengan perencanaan yang ada di tingkat lokal agar terjadi keselarasan antara tujuan-tujuan yang dibuat di tingkat nasional dengan tujuan-tujuan yang ada di tingkat masyarakat (lokal). Berdasarkan peranannya tersebut maka ada dua hal utama yang hendak dituju dari perencanaan wilayah, yaitu *Place Prosperity dan People Prosperity*.



TES FORMATIF 1

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di bawah ini yang bukan merupakan ciri dari pengertian tentang perencanaan, adalah
 - A. ada lembaga resmi yang mengatur
 - B. mempunyai tujuan akhir tertentu
 - C. memiliki sasaran-sasaran jangka pendek
 - D. memiliki kerangka waktu yang jelas

- 2) Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai dari perencanaan wilayah, adalah
 - A. terciptanya kesejahteraan yang optimal bagi penduduknya
 - B. integrasi pembangunan antar wilayah
 - C. menciptakan pertumbuhan konsumsi per kapita yang makin meningkat
 - D. kontinuitas dalam pelaksanaannya

- 3) Perencanaan pembangunan juga dapat dilihat dari sisi non fisik. Maksud dari pernyataan tersebut adalah
 - A. pembangunan dicirikan dengan adanya perubahan mendasar pada pendapatan masyarakat
 - B. pembangunan dicirikan dengan adanya perubahan pada pola kehidupan sosial masyarakat
 - C. pembangunan dicirikan dengan adanya perubahan mendasar pada seluruh pola kehidupan sosial masyarakat
 - D. pembangunan dicirikan dengan adanya perubahan mendasar pada pola kelembagaan (institusi) yang ada di masyarakat

- 4) Jika kita melihat pola pemikiran dari konsep *idealized planning* model yang dikemukakan oleh Bendavid Val maka titik sentral dari model perencanaan tersebut adalah
- A. adanya perumusan tujuan yang baik dari setiap rencana yang akan disusun
 - B. adanya publikasi rencana yang telah dibuat sehingga masyarakat bisa menilai bagaimana pelaksanaan rencana tersebut
 - C. adanya evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, agar rencana bisa diperbaiki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
 - D. adanya ketersediaan data yang bisa dianalisis secara terus menerus sehingga setiap tindakan dalam perencanaan selalu didasari oleh data yang benar
- 5) Salah satu penyebab mengapa suatu negara perlu melakukan perencanaan wilayah di samping perencanaan nasional adalah
- A. karena negara tersebut perlu merinci perencanaan nasionalnya agar lebih aplikatif
 - B. pemerintah negara tersebut menyadari bahwa terdapat perbedaan karakteristik dari wilayah-wilayah yang ada di negaranya
 - C. negara tersebut ingin menerapkan hierarki (urutan) perencanaan mulai dari perencanaan nasional, perencanaan wilayah, dan perencanaan lokal
 - D. agar terjadi kontinuitas dalam kebijakan perencanaan yang diberlakukan di negara tersebut.

B. Pilihlah jawaban Anda sesuai dengan aturan seperti di bawah ini:

Jika jawaban, (1), (2), dan (3) benar maka pilih A

Jika jawaban (1) dan (3) benar maka pilih B

Jika jawaban (2) dan (4) benar maka pilih C

Jika seluruh jawaban salah maka pilih D

- 6) Yang bukan merupakan ciri dari adanya perencanaan pembangunan di suatu wilayah atau suatu negara adalah....
- (1) Adanya peningkatan yang terus menerus pada *output* riil dari wilayah tersebut
 - (2) Adanya peningkatan yang terus menerus pada pendapatan riil dari masyarakatnya
 - (3) Adanya perubahan mendasar pada pola administratif pemerintahan di wilayah tersebut
 - (4) Adanya perubahan mendasar pada sistem sosial masyarakat yang ada di wilayah tersebut

- 7) Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk dalam perencanaan pembangunan wilayah adalah
 - (1) mengutamakan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri
 - (2) sebagai media untuk terjadinya mekanisme pasar
 - (3) memfokuskan untuk menggunakan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada di daerah
 - (4) merupakan upaya untuk membangun sistem kelembagaan yang lebih baik

- 8) Beberapa ilmu sosial yang terkait langsung dengan perencanaan wilayah adalah
 - (1) ilmu antropologi
 - (2) ilmu sosiologi
 - (3) ilmu politik
 - (4) ilmu komunikasi

- 9) Perencanaan wilayah sering juga disebut sebagai suatu perencanaan penghubung. Maksud dari pernyataan tersebut adalah
 - (1) perencanaan wilayah mampu menghubungkan perencanaan di tingkat pusat dengan perencanaan di tingkat lokal
 - (2) perencanaan wilayah mampu menghubungkan perencanaan yang ada di masing-masing daerah yang terpisah
 - (3) dalam kasus Indonesia perencanaan wilayah mampu menghubungkan perencanaan di tingkat nasional dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota
 - (4) dalam kasus Indonesia perencanaan wilayah mampu menghubungkan perencanaan yang ada di tiap pulau di Indonesia

- 10) Perencanaan wilayah dibuat untuk mencapai tujuan utama sebagai berikut, yaitu
 - (1) meningkatkan pendapatan penduduk di wilayah tersebut
 - (2) memperkecil terjadinya ketimpangan pendapatan antar masyarakat
 - (3) meningkatkan akses antar wilayah yang ada dalam suatu negara
 - (4) memperkecil disparitas antar wilayah yang ada dalam suatu negara

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Klasifikasi Wilayah (Wilayah)

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007, yang dimaksud dengan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Pengertian Wilayah selalu dikaitkan dengan area yang menjadi bagian dari wilayah nasional yang memiliki struktur yang komprehensif sehingga berfungsi secara independen, dalam pengertian bahwa wilayah tersebut akan dapat mengatur kegiatannya sendiri. Akan tetapi, meskipun setiap wilayah pada dasarnya merupakan sebuah daerah yang independen, dalam kenyataannya pasti akan selalu dijumpai adanya keterkaitan dengan wilayah yang lainnya (*interrelationship between region*). Wilayah merupakan suatu area geografis yang memiliki ciri khusus dan merupakan media dari berbagai aktivitas kegiatan untuk berlokasi dan berinteraksi. Oleh sebab itu, keterbukaan (*openess*) merupakan ciri utama dari sebuah wilayah karena pada dasarnya, setiap aktivitas kegiatan dalam satu wilayah akan sangat mudah berhubungan dengan aktivitas kegiatan lainnya di wilayah-wilayah sekitarnya.

Dalam mempelajari perencanaan wilayah sering kali kita harus memperinci dan kemudian berusaha untuk membedakan pengertian wilayah dari apa yang telah dijelaskan di atas. Untuk tujuan perencanaan wilayah paling tidak biasanya kita membedakan pengertian wilayah ke dalam 3 hal, yaitu

1. wilayah homogen
2. wilayah nodal (wilayah fungsional/ekonomi)
3. wilayah perencanaan/administratif

A. PENGERTIAN DAN CONTOH WILAYAH HOMOGEN

Ciri utama dari wilayah homogen adalah suatu wilayah yang memiliki suatu kesamaan karakteristik tertentu. Kesamaan karakteristik tersebut dapat berupa kesamaan dari sisi fisik, atau dari aktivitas ekonomi, bahkan dari kesamaan-kesamaan dalam sisi sosial masyarakat. Jika kita telah menentukan suatu wilayah dari sisi kehomogenan maka perbedaan-perbedaan internal atau intrawilayah menjadi tidak begitu dipentingkan lagi karena ketertarikan kita lebih pada kesamaan wilayah dibandingkan dengan ketidaksamaannya. Biasanya para perencana wilayah sering mengartikan bahwa konsep

homogenous wilayah merupakan konsep wilayah yang didasarkan pada pendekatan ekonomi karena biasanya dikaitkan dengan fungsi yang diemban oleh daerah tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan istilah wilayah homogen ini untuk berbagai kepentingan baik yang bersifat umum ataupun yang terkait dengan perencanaan wilayah. Misalkan saja, kita sering mendengar istilah DAS (daerah aliran sungai), atau suatu Kawasan Industri (KI), atau juga kita sering mendengar istilah Wilayah Pembangunan (WP) dalam kegiatan perencanaan wilayah. Ketiga contoh tersebut merupakan contoh-contoh dari wilayah homogen yang ada di sekitar kita.

DAS merupakan suatu wilayah homogen karena daerah-daerah di sekitar aliran sungai memiliki karakteristik wilayah yang sama, mereka memiliki kesamaan dalam hal iklim, vegetasi, dan bahkan topografi. Begitu juga dengan Kawasan Industri, daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik yang sama dari sisi tipe industri yang ada dan juga dari keberadaan infrastruktur pendukung aktivitas industri yang ada di daerahnya. Untuk wilayah pembangunan kehomogenan biasanya dilihat dari kesamaan karakteristik ekonomi, karakteristik sosial atau bahkan karakteristik fisik tertentu, misalkan Wilayah Pembangunan Periangan Timur di Provinsi Jawa Barat memiliki kesamaan dari sisi sosial budaya masyarakat.

B. PENGERTIAN DAN CONTOH WILAYAH NODAL

Satu karakteristik yang menjadi ciri utama dari suatu wilayah yang masuk dalam kategori wilayah nodal adalah adanya kecenderungan dari aktivitas wilayah untuk terpusat pada satu kegiatan yang dominan (yang disebut node) di wilayah tersebut. Wilayah ini memiliki sifat yang lebih dinamis dibandingkan dengan pengertian wilayah homogen karena baik luasan wilayah maupun aktivitas dominan yang ada di suatu wilayah akan berbeda-beda. Misalkan, luasan aktivitas akan berbeda-beda bergantung pada besarnya "daya tarikan" (*pull factor*) dari kegiatan yang dominan (node) yang ada di wilayah tersebut. Begitu juga dengan sebuah node, juga akan bisa berubah sebagai akibat adanya perubahan lingkungannya, seperti kegiatan pertambangan (yang menjadi node di suatu wilayah) akan berganti apabila bahan tambang di wilayah tersebut sudah sangat berkurang. Seperti juga wilayah homogen, wilayah nodal juga disebut sebagai wilayah fungsional (karena wilayah tersebut memiliki fungsi tertentu, seperti fungsinya sebagai kawasan metropolitan) atau juga wilayah yang

didasarkan atas pendekatan ekonomi (*economic region*/wilayah ekonomi) karena keterkaitan aktivitas ekonomi yang biasa membuat beberapa daerah tersebut terkait satu dengan lainnya.

Contoh wilayah nodal yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah Wilayah Metropolitan Jabodetabek (Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi) di mana semua aktivitas kegiatan di sekitar wilayah tersebut akan tertarik ke Jakarta, sehingga Jakarta dianggap sebagai node. Begitu juga daerah Metropolitan Bandung Raya (yang terdiri atas Bandung, Cianjur, dan Sumedang) dengan pusat kegiatan di Kota Bandung. Keterkaitan aktivitas ekonomi di wilayah metropolitan biasanya melewati batas-batas administratif wilayah itu sendiri, misalkan saja Wilayah Metropolitan Jabodetabek tidak sama dengan wilayah administrasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi karena tidak semua daerah di wilayah administrasi Bogor atau Bekasi yang tertarik dengan aktivitas yang ada di Jakarta. Oleh sebab itu, di beberapa negara maju untuk setiap wilayah metropolitan selalu dibuat data statistik yang dinamakan MSA (*Metropolitan Statistical Area*), yaitu data yang diambil dari daerah-daerah di suatu metropolitan yang kegiatannya terkait dengan node-nya (berbeda dengan data administratif wilayah yang bersangkutan).

C. PENGERTIAN DAN CONTOH WILAYAH PERENCANAAN/ADMINISTRATIF

Yang dimaksud dengan wilayah administratif adalah suatu daerah yang terbentuk karena adanya kebijakan politis dari pemerintah. Biasanya bentuk wilayahnya berupa batas-batas administratif dari suatu wilayah pemerintahan, seperti kabupaten, atau provinsi. Setiap wilayah kabupaten atau provinsi batas-batas wilayahnya ditentukan secara jelas berdasarkan undang-undang pendirian wilayah tersebut. Definisi wilayah yang ada pada UU No. 26/2007 merupakan definisi wilayah secara administratif.

Contoh dari wilayah administratif ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan data-data statistik sebagai bahan pendukung analisis pembangunan selalu didasarkan pada wilayah administratifnya. Misalkan, wilayah Kabupaten Purwokerto di Jawa Tengah, atau wilayah Provinsi Kalimantan Timur, merupakan contoh dari wilayah administratif di mana batas-batas wilayah dari wilayah administrasi tersebut ditentukan oleh undang-undang pendirian wilayah masing-masing.

Di Indonesia saat ini pembagian wilayah lebih banyak didasarkan atas pengertian administratif wilayah (bahkan semua data statistik yang ada di Indonesia selalu didasari oleh karakteristik wilayah administrasi). Satu kelemahan dari wilayah administrasi adalah bahwa kegiatan perekonomian masyarakat tidak selalu mengikuti wilayah administratif – kegiatan-kegiatan tersebut akan selalu mengikuti wilayah ekonominya. Menurut Brodjonegoro (...), jika wilayah ekonomi tidak sama dengan wilayah perencanaan maka akan terjadi dua hal sebagai berikut.

1. Terjadi *spillover effect*

Misalkan, kita mengindikasikan diperlukannya penyediaan prasarana infrastruktur untuk suatu ekonomi wilayah, akan tetapi sistem yang ada hanya mungkin dilakukan melalui wilayah perencanaan. Akibatnya, akan ada penambahan beban pada prasarana infrastruktur tersebut yang berasal dari luar wilayah ekonomi tersebut (adanya penambahan aktivitas yang berasal dari luar wilayah ekonomi tersebut dinamakan *spillover effect*). Dampak *spillover* ini dapat dianggap sebagai sebuah eksternalitas bagi suatu wilayah.

2. Mengganggu skala ekonomi

Pada dasarnya, aktivitas dalam suatu wilayah ekonomi akan terganggu jika terlalu banyak wilayah perencanaan karena pembatasan administratif yang tidak sesuai dengan keterkaitan ekonomi akan mengganggu aktivitas ekonomi yang terjadi yang ada di masyarakat. Misalkan saja, pelestarian wilayah di sepanjang DAS tertentu yang melalui beberapa kabupaten mungkin akan terganggu jika perencanaannya diserahkan kepada masing-masing kabupaten (karena setiap kabupaten mungkin akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda) yang pada akhirnya akan mengganggu produktivitas wilayah di sepanjang DAS tersebut secara keseluruhan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi yang telah diuraikan, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan minimal 2 karakteristik dari pengertian wilayah yang Anda pelajari!
- 2) Jelaskan mengapa pengertian wilayah homogen dan wilayah nodal, sering juga disebut sebagai pengertian wilayah dari sisi ekonomi!
- 3) Berikan contoh-contoh konkret dari wilayah yang termasuk dalam kategori wilayah nodal!
- 4) Apa yang dimaksud dengan pengertian wilayah administrasi?
- 5) Sebutkan dua dampak jika luas wilayah berdasarkan konsep wilayah ekonomi tidak sama dengan luas wilayah yang didasarkan pada konsep wilayah perencanaan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda dapat membaca kembali penjelasan tentang pengertian wilayah.
- 2) Lihat penjelasan tentang wilayah homogen dan wilayah nodal.
- 3) Pelajari secara seksama contoh-contoh dari wilayah nodal.
- 4) Baca kembali pengertian wilayah administrasi.
- 5) Lihat kembali bagian akhir dari penjelasan wilayah administrasi.



RANGKUMAN

Wilayah merupakan area yang menjadi bagian dari wilayah nasional yang memiliki struktur yang komprehensif dan memiliki ciri khusus serta merupakan media dari berbagai aktivitas kegiatan untuk berlokasi dan berinteraksi. Terkait dengan perencanaan wilayah, pengertian wilayah dapat dibedakan dari 2 pendekatan, yaitu

1. pendekatan ekonomi, yang kemudian bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu wilayah *homogenous* dan wilayah *nodal*;
2. pendekatan perencanaan, yang biasanya didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, wilayah ini biasa disebut sebagai wilayah administrasi.

Jika wilayah ekonomi tidak sama dengan wilayah perencanaan maka akan terjadi dua hal sebagai berikut.

1. Terjadi *spillover effect*.
2. Mengganggu skala ekonomi.



TES FORMATIF 2

A. Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap tepat!

- 1) Dari berbagai contoh wilayah yang ada di bawah ini, manakah wilayah yang didasarkan pada konsep ekonomi?
 - A. Wilayah Kabupaten Temanggung.
 - B. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - C. Daerah Aliran Sungai Kapuas.
 - D. Tidak ada jawaban yang benar.
- 2) Data ekonomi resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggambarkan kondisi suatu wilayah didasarkan pada pendekatan kewilayahan dari sisi pendekatan wilayah
 - A. homogen
 - B. nodal
 - C. ekonomi
 - D. perencanaan
- 3) Pembagian Indonesia ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah Indonesia Bagian Barat, Wilayah Indonesia Bagian Tengah, dan Wilayah Indonesia bagian Timur, lebih ditekankan pada pembagian wilayah berdasarkan konsep pendekatan wilayah
 - A. homogen
 - B. nodal
 - C. ekonomi
 - D. perencanaan
- 4) Kelemahan utama dari sisi data statistik (terutama data ekonomi) yang didasari pada konsep wilayah administratif adalah
 - A. biasanya keterkaitan kegiatan perekonomian tidak selalu sama dengan batas-batas administrasi
 - B. data statistik tersebut hanya menggambarkan seluruh aktivitas yang ada di wilayah administratif tertentu saja

- C. dapat menjelaskan bagaimana suatu perkembangan perekonomian dari suatu wilayah administratif terjadi
- D. wilayah administratif dapat membatasi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat
- 5) Di luar negeri data-data statistik bisa didapatkan di luar batas-batas administrasi, seperti misalkan saja MSA (*Metropolitan Statistical Area*). Data yang berasal dari MSA diperoleh dari konsep perwilayahan yang didasarkan pada pendekatan wilayah
- homogen
 - nodal
 - administratif
 - perencanaan
- B. Pilihlah jawaban anda sesuai dengan aturan seperti di bawah ini:**
 Jika jawaban, (1), (2), dan (3) benar maka pilih A
 Jika jawaban (1) dan (3) benar maka pilih B
 Jika jawaban (2) dan (4) benar maka pilih C
 Jika seluruh jawaban salah maka pilih D
- 6) Di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari pendekatan wilayah homogen adalah
- Wilayah Pembangunan (WP) pada Rencana Tata Ruang suatu daerah
 - Wilayah Kapet (Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu)
 - Wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI)
 - Wilayah segitiga pertumbuhan seperti Sijori (Singapura–Johor–Riau)
- 7) Di bawah ini yang bukan merupakan ciri dari sebuah wilayah berdasarkan definisinya adalah.....
- merupakan bagian dari wilayah nasional
 - memiliki struktur yang komprehensif
 - memiliki ciri khusus
 - tempat berlokasinya dan berinteraksinya berbagai kegiatan
- 8) Dari semua pernyataan di bawah ini, yang merupakan pernyataan yang benar adalah.....
- aktivitas dalam suatu wilayah ekonomi akan terganggu jika terlalu banyak wilayah perencanaan
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dikatakan suatu wilayah homogen karena memiliki kesamaan dalam hal iklim, vegetasi dan juga dari sisi topografi

- (3) wilayah nodal dicirikan dengan adanya kecenderungan dari aktivitas wilayah untuk terpusat (tertarik) pada satu kegiatan yang dominan di wilayah tersebut
- (4) setiap wilayah pada dasarnya merupakan sebuah daerah yang independen satu dengan lainnya
- 9) Pembentukan wilayah di Indonesia saat ini lebih banyak didasari atas pengertian wilayah pendekatan wilayah
- (1) homogen
 - (2) administratif
 - (3) nodal
 - (4) perencanaan
- 10) Di bawah ini yang merupakan contoh dari adanya *spillover effect* dalam suatu perekonomian daerah sebagai akibat dari ketidaksamaan antara wilayah administratif dan wilayah ekonomi adalah
- (1) adanya persebaran mal di wilayah sekitar Bodetabek yang berbatasan dengan Jakarta
 - (2) persebaran aktivitas prasarana pendidikan tinggi di Kabupaten Sumedang yang berbatasan langsung dengan Bandung
 - (3) berkembangnya aktivitas industri dan penduduknya di wilayah Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Surabaya
 - (4) berkembangnya aktivitas pendukung (seperti perdagangan dan jasa) di wilayah Karawang karena adanya aktivitas industri di daerah tersebut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Analisis Nasional Vs Analisis Wilayah?**

Dari penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa pada dasarnya wilayah (yang sering juga disebut sebagai *sub-national*) merupakan bagian dari wilayah nasional, dan juga karena perencanaan wilayah pada dasarnya memiliki kesamaan karakteristik dan merupakan bagian dari perencanaan nasional. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam menganalisis perekonomian wilayah dibandingkan dengan analisis perekonomian nasional – yang didasarkan pada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh wilayah dibandingkan dengan nasional. Beberapa hal yang membedakan antara analisis wilayah dengan analisis nasional, di antaranya dapat ditinjau dari 3 hal di bawah ini:

1. perbedaan derajat keterbukaannya (*openness*);
2. perbedaan variabel-variabel makro wilayah dibandingkan dengan variabel makro nasional;
3. perbedaan neraca-neraca pendukung analisis perekonomian wilayah dan nasional.

A. PERBEDAAN DARI SISI DERAJAT KETERBUKAAN DAN DAMPAKNYA

Keterbukaan (*openness*) adalah suatu ukuran yang dikaitkan dengan tingkat kemudahan arus keluar masuk dari komoditi (barang dan jasa) antara daerah. Ukuran kemudahan ini diukur dengan derajat keterbukaan (*degree of openness*), semakin terbuka sebuah daerah maka dikatakan memiliki derajat keterbukaan yang tinggi dan sebaliknya, semakin tertutup sebuah daerah maka nilai derajat keterbukaannya pun akan rendah pula.

Cara termudah untuk mengukur derajat keterbukaan suatu daerah adalah dengan menghitungnya berdasarkan rumus:

$$Openness = \frac{X + M}{GDP}$$

Di mana:

- X = jumlah ekspor barang dan jasa ke daerah lain (termasuk luar negeri) yang berhasil dilakukan oleh suatu daerah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun)
- M = jumlah impor barang dan jasa yang berhasil dari daerah lain (termasuk luar negeri) yang dilakukan oleh suatu daerah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun)
- GDP = *Gross Domestic Product*, yaitu jumlah nilai barang dan jasa final yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Untuk perhitungan *openness* wilayah variabel GDP harus diganti dengan variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Biasanya tingkat keterbukaan wilayah lebih besar dibandingkan dengan tingkat keterbukaan nasional. Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi ini dapat terjadi, yaitu

1. Dalam pergerakan arus komoditi antar wilayah tidak ada hambatan perdagangan, misalnya tarif, pajak ekspor atau pajak impor. Aktivitas Ekspor dan Impor dalam pandangan analisis wilayah adalah aktivitas arus barang dan jasa antar wilayah, tidak peduli apakah wilayah tersebut di dalam suatu negara ataukah berbeda negara. Sebagian besar aktivitas ekspor dan impor dari suatu wilayah adalah dalam bentuk perdagangan antar wilayah (*interregional trade*) yang tidak memerlukan peraturan-peraturan perdagangan karena masih berada dalam suatu negara yang sama. Berbeda dengan aktivitas perdagangan antar negara (*international trade*) yang membutuhkan peraturan-peraturan tertentu yang berbeda untuk masing-masing negara. Perbedaan-perbedaan peraturan antar negara ini yang dapat menghambat perdagangan di tingkat internasional.
2. Aktivitas perdagangan antar daerah tidak memerlukan adanya *exchange control* karena masih berada dalam satu wilayah nasional. Perdagangan internasional akan selalu dipengaruhi oleh *exchange control* tersebut, berupa kurs nilai tukar mata uang yang berbeda untuk masing-masing negara, yang pada akhirnya bisa dijadikan sumber penghambat perdagangan.
3. Perdagangan internasional biasanya juga dipengaruhi oleh hambatan-hambatan administrasi (seperti pemberlakuan bea cukai, kuota, imigrasi, dan lain-lain) karena adanya perbedaan peraturan antar negara. Sementara itu, dalam perdagangan antar wilayah hal-hal tersebut tidak berlaku karena

sistem administrasi yang ada dalam suatu negara adalah seragam sehingga tidak terjadi hambatan administrasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

B. PERBEDAAN DARI SISI VARIABEL-VARIABEL MAKRO YANG TIDAK BERLAKU DALAM ANALISIS WILAYAH

Hal kedua yang membedakan analisis wilayah dengan analisis nasional adalah dari sisi variabel-variabel makro yang dimiliki oleh wilayah dan nasional. Ada beberapa variabel makro yang akan tidak berlaku di dalam analisis wilayah, tetapi akan sangat berlaku untuk analisis/pembahasan di tingkat nasional. Salah satu contoh dari variabel makro tersebut adalah tingkat kurs mata uang, hubungan antar wilayah tidak memerlukan perbedaan kurs karena tingkat kurs mata uang untuk semua wilayah dalam sebuah negara adalah sama. Oleh sebab itu, variabel makro seperti kurs mata uang tidak berlaku dalam analisis wilayah, akan tetapi sebaliknya akan sangat dipertimbangkan untuk tingkat nasional. Begitu juga dengan tingkat suku bunga nominal, di mana tingkat suku bunga nominal di seluruh negara akan sama (kecuali tingkat suku bunga riil).

Perbedaan lain yang dapat dijelaskan untuk membedakan analisis wilayah dan nasional dari sisi variabel makro adalah bahwa sering kali kita membedakan variabel ke dalam pengertian kemudahannya untuk dipengaruhi atau tidak. Dalam pembahasan permodelan statistika atau matematika tingkat kemudahan mempengaruhi variabel dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu

1. variabel endogen, yaitu variabel yang secara langsung berpengaruh pada variabel dependen karena variabel endogen akan masuk ke dalam model;
2. variabel eksogen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen akan tetapi tidak termasuk ke dalam model, sehingga lebih tidak dapat terkontrol oleh model itu sendiri.

Untuk analisis wilayah biasanya yang menjadi variabel eksogen adalah variabel-variabel nasional itu sendiri, misalkan dalam pembahasan mengenai pertumbuhan perekonomian wilayah maka variabel eksogen yang biasa diambil adalah GDP nasional atau jumlah dana yang berhasil ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah wilayah. Oleh karena perkembangan GDP nasional maupun jumlah transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan perekonomian wilayah, selain dari variabel-variabel lain yang ada di tingkat wilayah, seperti investasi wilayah, jumlah

penduduk wilayah, dan lain-lain. Kedua variabel tersebut (GDP dan transfer) merupakan dua buah variabel yang relatif dapat dikontrol karena dapat diprediksi secara baik dengan menggunakan metode kuantitatif tertentu. Sementara itu, untuk kasus pertumbuhan perekonomian nasional maka variabel eksogen yang bisa diambil adalah pertumbuhan perekonomian dunia dan dana transfer luar negeri yang masuk ke suatu negara tertentu. Kedua variabel tersebut (pertumbuhan perekonomian dunia, dan dana transfer luar negeri) merupakan variabel internasional yang sulit untuk diukur dan diprediksi, tingkat ketidakpastiannya yang sangat besar karena harus mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi di antara sejumlah besar negara-negara yang ada di dunia ini. Berdasarkan kedua kasus perhitungan tersebut terlihat bahwa terjadi perbedaan di antara penilaian variabel-variabel makro untuk pembahasan analisis wilayah dan analisis nasional.

C. PERBEDAAN NERACA-NERACA PENDUKUNG ANALISIS WILAYAH DENGAN ANALISIS NASIONAL

Setiap analisis, baik wilayah maupun nasional, didasarkan atas data-data pokok yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan daerahnya. Menurut Isard (1960), yaitu pada dasarnya baik analisis nasional maupun analisis wilayah didasarkan atas 4 data pokok yang seharusnya ada (dengan tingkat analisis yang berbeda-beda bergantung tingkatan daerahnya). Ke-4 data tersebut adalah sebagai berikut.

1. Neraca Pendapatan dan Produksi

Pada dasarnya, data yang ada pada neraca ini berusaha untuk mengukur besarnya pendapatan/produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Secara teoritis ada 3 cara perhitungan pendapatan nasional, pertama dengan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), yaitu mengukur setiap belanja/pengeluaran yang dilakukan oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam aktivitas kegiatan perekonomian daerah, seperti konsumsi (C) untuk konsumen, investasi (I) untuk produsen, pengeluaran pemerintah (G) untuk Pemerintah serta pengeluaran untuk ekspor (X) dan impor (M). Cara pengukuran kedua adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*), yaitu mengukur pendapatan/produksi yang didasarkan pada jumlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, seperti upah (untuk pendapatan faktor

produksi pekerja), tingkat suku bunga (untuk pendapatan para pemilik modal), serta sewa (untuk pendapatan para pemilik sumber daya alam). Sementara itu, perhitungan pendapatan yang terakhir adalah dengan pendekatan produksi (*production approach*), yaitu suatu perhitungan produksi nasional yang didasarkan atas prinsip nilai tambah (*added value*) dari masing-masing jenis komoditi yang dihasilkan.

Ketiga pendekatan perhitungan ini dapat dilakukan untuk lingkup nasional, dan menghasilkan data PDB (Produk Domestik Bruto), sedangkan untuk tingkatan wilayah di Indonesia data mengenai jumlah produksi yang dihasilkan dinyatakan dalam data PDRB (Produk Domestik wilayah Bruto). Paling tidak, perhitungan PDRB di tingkat wilayah hanya dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan saja, yaitu pendekatan pengeluaran dan produksi (untuk perhitungan PDRB provinsi dapat dihitung dengan pendekatan pengeluaran dan produksi, sedangkan untuk PDRB kabupaten hanya dapat dihitung dengan pendekatan produksi saja).

Dengan adanya perbedaan dalam perhitungan pendapatan maka beberapa analisis yang mungkin dilakukan di tingkat nasional menjadi tidak dapat dilakukan pada tingkat wilayah, misalkan saja pada analisis wilayah tidak mungkin didapatkan data tentang pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing faktor produksi, seperti seberapa besar bagian dari pendapatan wilayah yang dinikmati oleh para pekerja, atau para pemilik modal. Pada akhirnya, pada analisis pendapatan wilayah tidak dimungkinkan dilakukan penilaian mengenai perbedaan pendapatan antar faktor produksi sehingga tidak dapat diketahui seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masing-masing pemilik faktor produksi.

2. Neraca Pembayaran

Kegunaan utama dari neraca pembayaran (*balance of payment*) ini adalah untuk mengetahui:

- a. arus barang, jasa, dan modal yang keluar masuk antar daerah;
- b. dapat mengukur pergerakan sumber daya antar daerah;
- c. mengetahui derajat keterbukaan dari masing-masing daerah;
- d. mengidentifikasi adanya surplus atau defisit yang dialami oleh suatu daerah.

Neraca pembayaran terdiri atas 3 neraca utama, yaitu:

- a. neraca perdagangan, yang mengukur perkembangan arus keluar masuk barang-barang antar daerah;
- b. neraca jasa, yang mengukur perkembangan arus keluar masuk jasa-jasa antar daerah;
- c. neraca modal, yang mengukur arus modal masuk (*capital inflow*) serta arus modal keluar (*capital outflow*) antar daerah.

Saat ini, keberadaan neraca pembayaran di tingkat nasional selalu tersedia dengan baik. Bank Indonesia selalu melaporkan perkembangan neraca ini setiap tahunnya (bahkan juga tiap triwulan) sehingga dapat diketahui perkembangan arus barang, jasa, dan modal yang keluar atau masuk ke Indonesia. Akan tetapi, di tingkat wilayah keberadaan neraca ini masih belum tersedia sehingga dalam kenyataannya di Indonesia kita belum dapat menganalisis perkembangan variabel-variabel seperti yang telah dijelaskan.

3. Neraca Arus Dana

Neraca ini berguna untuk memberikan informasi mengenai aliran dana dari suatu daerah ke daerah lainnya dalam suatu negara. Biasanya pergerakan dana ini akan terlihat dari transfer dana antar bank sehingga biasanya neraca ini akan terlihat dari laporan bank sentral wilayah. Untuk kasus Indonesia, sistem perbankan yang ada tidak menganut sistem perwilayahan bank (Indonesia menganut sistem bank cabang/*branch system*) sehingga pergerakan aliran dana antar daerah tidak dapat diketahui dengan pasti (karena bank sentral wilayah tidak diwajibkan untuk mencatat hal tersebut).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perkembangan aliran dana antar daerah tidak dapat dijadikan bahan analisis untuk perencanaan wilayah. Tidak seperti tingkat nasional yang secara pasti bisa mengetahui aliran dana yang masuk dan keluar dari Negara Indonesia.

4. Tabel *Input-Output*

Prinsip dasar dari tabel *input-output* wilayah adalah mengidentifikasi dan mendisagregasi semua aliran pengeluaran antara berbagai aktivitas ekonomi (sektoral/industri), antar konsumen dan aktivitas ekonomi, antar aktivitas ekonomi dan penyediaan input yang ada dalam struktur perdagangan. Berdasarkan tabel *input-output* kita dapat mengetahui potret perekonomian berdasarkan keterkaitan antar sektor/industri, seperti bagaimana keterkaitan

sektor industri dengan sektor pertanian sehingga kita dapat mengetahui bagaimana perubahan dalam sektor industri akan terjadi sebagai akibat adanya perubahan di sektor pertanian. Penjelasan mengenai bagaimana analisis dari tabel ini akan secara lengkap dijelaskan pada modul 5.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Kegiatan Belajar 3, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan tiga hal yang membuat sebuah daerah memiliki tingkat keterbukaan yang lebih besar dibandingkan dengan nasionalnya!
- 2) Jika diketahui suatu daerah A di Negara B memiliki data sebagai berikut.

Indikator	Daerah A	Negara B
Ekspor (juta)	6000	25.000
Impor (juta)	5000	20.000
Pendapatan (Miliar)	50	400

Berdasarkan data tersebut manakah yang tingkat keterbukaannya lebih besar (daerah A atau negara B)?

- 3) Jelaskan paling tidak dua hal dari analisis kondisi makro ekonomi yang tidak dibutuhkan pada tingkat wilayah!
- 4) Bagaimana konsekuensinya terhadap analisis wilayah apabila daerah di Indonesia tidak dapat menghitung neraca dari pendekatan pendapatan (*income approach*)?
- 5) Jelaskan pengertian dari komponen-komponen pembentuk neraca pembayaran daerah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat penjelasan terakhir dari subbab perbedaan tingkat keterbukaan antara daerah dengan nasional!
- 2) Coba Anda hitung kedua data tersebut dengan menggunakan rumus tingkat keterbukaan, nilai yang terbesar menunjukkan tingkat keterbukaan yang lebih besar!

- 3) Lihat penjelasan subbab perbedaan dari sisi variabel-variabel makro yang tidak berlaku dalam analisis wilayah
- 4) Ingat kembali pembahasan tentang perbedaan neraca pendapatan dan produksi di tingkat daerah dan nasional.
- 5) Baca kembali uraian yang ada pada sub bahasan neraca pembayaran!



RANGKUMAN

Terdapat perbedaan dalam menganalisis perekonomian wilayah dibandingkan dengan analisis perekonomian nasional. Beberapa hal yang membedakan antara analisis wilayah dengan analisis nasional, diantaranya bisa dilihat dari 3 hal di bawah ini

1. *Perbedaan derajat keterbukaannya (openess)*. Biasanya derajat keterbukaan suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan derajat keterbukaan suatu negara.
2. *Perbedaan variabel-variabel makro wilayah dibandingkan dengan variabel makro nasional*. Beberapa variabel makro ekonomi (terutama variabel-variabel yang berlaku secara umum di tiap daerah) tidak berpengaruh dalam analisis antar wilayah, akan tetapi sangat berpengaruh pada analisis nasional.
3. *Perbedaan neraca-neraca pendukung analisis perekonomian wilayah dan nasional*. Untuk kasus Indonesia, beberapa neraca pendukung belum tersedia di tingkat wilayah (akan tetapi sudah tersedia dengan baik ditingkat nasional) sehingga pembahasan yang lebih dalam pada analisis wilayah akan lebih sulit dibandingkan dengan analisis nasional.



TES FORMATIF 3

A. Pilihlah satu jawaban yang anda anggap tepat !

- 1) Adanya *openness* yang lebih besar di suatu daerah dibandingkan dengan nasional, salah satunya diakibatkan oleh relatif bebasnya aliran perdagangan antar daerah dibandingkan dengan antar negara. Salah satu penyebab dari bebasnya aliran perdagangan antar daerah adalah
 - A. biaya transpor yang lebih murah
 - B. tidak memerlukan dokumen-dokumen pengangkutan barang

- C. memiliki sistem perbankan yang sama
 - D. memiliki aturan yang sama
- 2) Yang dimaksud dengan neraca modal daerah adalah
- A. suatu data yang menggambarkan keterkaitan utang antar daerah dalam suatu negara
 - B. menggambarkan kondisi jumlah modal yang dimiliki oleh suatu daerah dalam selang waktu tertentu
 - C. data statistik yang mengukur arus modal masuk dan arus modal keluar di suatu daerah dalam selang waktu tertentu
 - D. data yang menggambarkan besarnya investasi yang masuk ke dalam suatu daerah dalam periode waktu tertentu
- 3) Manakah variabel nasional yang tidak berpengaruh pada analisis wilayah
- A. PDB
 - B. tingkat bunga riil
 - C. nilai tukar mata uang
 - D. investasi
- 4) Hingga saat ini daerah di Indonesia belum bisa menghitung pendapatan wilayahnya dengan seluruh metode yang ada. Pada tingkat provinsi pendekatan perhitungan pendapatan wilayah yang mana belum bisa diketahui nilainya
- A. pendekatan pendapatan
 - B. pendekatan pengeluaran
 - C. pendekatan produksi
 - D. semua jawaban salah
- 5) Beberapa variabel di bawah ini merupakan variabel-variabel yang dapat menentukan besarnya *openess* dari suatu wilayah, *kecuali*
- A. nilai PDRB wilayah tersebut
 - B. besarnya investasi yang masuk ke wilayah tersebut
 - C. besarnya ekspor wilayah tersebut
 - D. besarnya impor ke wilayah tersebut

B. Pilihlah jawaban Anda sesuai dengan aturan seperti di bawah ini.

Jika jawaban, (1), (2), dan (3) benar maka pilih A

Jika jawaban (1) dan (3) benar maka pilih B

Jika jawaban (2) dan (4) benar maka pilih C

Jika seluruh jawaban salah maka pilih D

- 6) Neraca pembayaran daerah diperlukan karena dapat memberikan informasi mengenai
 - (1) pergerakan arus barang, jasa dan modal yang keluar dan masuk antar daerah
 - (2) dapat mengukur pergerakan sumber daya antar daerah
 - (3) mengetahui derajat keterbukaan dari masing-masing daerah
 - (4) pergerakan tenaga kerja antar daerah
- 7) Di bawah ini adalah beberapa data yang sama sekali belum ada untuk daerah di Indonesia
 - (1) neraca pendapatan dan produksi
 - (2) neraca pembayaran daerah
 - (3) tabel *input-output*
 - (4) neraca arus dana
- 8) Perdagangan antardaerah lebih leluasa dilakukan dibandingkan dengan perdagangan internasional, dikarenakan
 - (1) tidak memerlukan dokumen-dokumen administrasi yang menghambat
 - (2) lingkup wilayahnya lebih kecil
 - (3) masih berada dalam satu negara
 - (4) memiliki biaya distribusi yang relatif murah
- 9) Beberapa pernyataan di bawah ini menunjukkan analisis wilayah yang dapat dilakukan dengan menggunakan tabel *input output* wilayah, *kecuali*
 - (1) dapat menggambarkan hubungan aktivitas antar berbagai sektor perekonomian yang ada di daerah
 - (2) dapat menggambarkan keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan penyedia input
 - (3) bisa mengetahui *multiplier effect* sebagai akibat dari adanya tindakan pemerintah kepada pasar
 - (4) bisa dijadikan analisis antar aktivitas ekonomi dan penyediaan input

- 10) Neraca pembayaran daerah pada dasarnya terdiri atas sekumpulan neraca-neraca yang memiliki fungsi tertentu. Di bawah ini yang merupakan komponen dari neraca pembayaran daerah adalah
- (1) neraca perdagangan, yang berfungsi mengetahui besarnya ekspor dan impor barang dari daerah tertentu ke daerah lainnya
 - (2) neraca jasa, yang berfungsi untuk mengetahui besarnya pergerakan arus tenaga kerja dari dan keluar daerah
 - (3) neraca modal, yang berfungsi untuk mengetahui arus modal masuk (*capital inflow*) serta arus modal keluar (*capital outflow*) antar daerah
 - (4) neraca cash, yang berfungsi untuk mengetahui arus dana yang masuk serta dana yang keluar antar daerah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1) Jawab A

Karakteristik utama perencanaan secara umum adalah memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai, ada sasaran-sasaran jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut, serta terkait dengan kerangka waktu yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Lembaga resmi yang mengatur perencanaan hanya dibutuhkan bagi perencanaan pembangunan, bukan perencanaan secara umum

2) Jawab B

Setiap perencanaan bertujuan agar dapat dijalankan secara berkesinambungan, oleh sebab itu kontinuitas pelaksanaan merupakan bagian dari tujuan sebuah rencana. Khusus untuk perencanaan wilayah ada dua tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) yang dalam kenyataannya bisa proxy dari adanya peningkatan pada laju konsumsi per kapita penduduknya, serta kesejahteraan wilayah (*place prosperity*) yang dalam kehidupan nyata lebih ditekankan pada mengecilnya disparitas pembangunan antar wilayah. Integrasi pembangunan antar wilayah adalah tugas dari perencanaan secara nasional

3) Jawab C

Pembangunan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial (non fisik). Dari sisi aspek non fisik pembangunan dicirikan dengan adanya perubahan mendasar pada seluruh pola kehidupan sosial masyarakat (baik dari sisi institusi, *culture*, *attitude*, *administrative*, dan lain-lain)

4) Jawab D

Model perencanaan yang ideal memfokuskan pada pentingnya data dan analisis data sebagai alat utama untuk melakukan setiap tindakan dalam perencanaan. Analisis dan pengumpulan data merupakan fungsi yang secara terus menerus mendukung semua kegiatan dan sekaligus menerima informasi dari semua kegiatan yang ada dalam proses perencanaan.

5) Jawab B

Suatu negara bisa jadi memiliki berbagai macam perbedaan karakteristik dan fungsional dari daerah-daerah (wilayah) yang dimilikinya, hal itulah yang menyebabkan perlu adanya perencanaan wilayah karena akan sangat

tidak mungkin apabila perencanaannya hanya didasarkan pada perencanaan nasional saja.

- 6) Jawab D
Perencanaan pembangunan memiliki dua karakteristik, yaitu *physical growth* (seperti pertumbuhan riil dari *output* dan pendapatan) dan *fundamental changes* (seperti perubahan pada kondisi sosial, administratif, institusi, dan budaya).
- 7) Jawab B
Maksud dari perencanaan pembangunan wilayah, yaitu
- memberikan perlindungan sosial dan ekonomi karena adanya ketimpangan, kemiskinan, dan tekanan terhadap sumber daya alam;
 - sebagai media untuk terjadinya mekanisme pasar;
 - menyediakan perangkat bagi perencanaan pembangunan itu sendiri;
 - merupakan suatu upaya untuk membangun sistem kelembagaan yang lebih baik lagi.
- 8) Jawab A
Seperti yang ada pada Gambar 1.2 maka bidang ilmu sosial yang terkait langsung dengan perencanaan wilayah di antaranya adalah:
- ilmu politik;
 - ilmu antropologi;
 - ilmu sosiologi;
 - ilmu ekonomi.
- 9) Jawab B
Perencanaan wilayah dianggap sebagai perencanaan penghubung dalam pengertian bahwa perencanaan wilayah mampu menghubungkan perencanaan di tingkat pusat dengan perencanaan di tingkat lokal atau dalam kasus Indonesia perencanaan wilayah mampu menghubungkan perencanaan di tingkat nasional dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota.
- 10) Jawab C
Tujuan utama dari perencanaan wilayah adalah terciptanya *place prosperity* atau memperkecil ketimpangan antar wilayah (*regional disparity*) dan *people prosperity* atau memperkecil ketimpangan pendapatan antar masyarakat (*income disparity*).

Tes Formatif 2

1) Jawab C

Yang termasuk ke dalam kategori wilayah dengan konsep ekonomi adalah wilayah homogen dan wilayah nodal. Oleh karena daerah aliran sungai (DAS) merupakan salah satu wilayah dari konsep wilayah homogen maka DAS Kapuas merupakan wilayah yang didasarkan pada konsep ekonomi.

2) Jawab D

Hingga saat ini setiap data resmi yang dikeluarkan oleh BPS di Indonesia didasarkan pada pendekatan wilayah administratif (wilayah perencanaan) seperti Jawa Barat Dalam Angka, Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Kampar, dan lain sebagainya.

3) Jawab A

Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 3 bagian wilayah, lebih didasarkan pada pengelompokan wilayah dari sisi wilayah homogen. Oleh karena pada dasarnya baik Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur memiliki karakteristik khas yang bisa dibedakan satu dengan yang lainnya (misalkan saja dari kemajuan pembangunannya atau dari karakteristik lainnya)

4) Jawab A

Keterkaitan kegiatan perekonomian tidak selalu sama dengan batas-batas administrasi, atas dasar inilah maka data statistik (terutama ekonomi) sering kali tidak dapat menggambarkan kondisi perekonomian yang sesungguhnya karena dibatasi oleh wilayah administrasi

5) Jawab A

Data MSA didasarkan pada konsep perwilayahan dari pendekatan wilayah nodal, di mana suatu metropolitan ditandai dengan adanya aktivitas dominan dari sebuah pusat yang tidak lain adalah inti dari metropolitan itu sendiri.

6) Jawab B

Wilayah homogen didasarkan pada adanya kesamaan karakteristik dari suatu wilayah. Wilayah Pembangunan (WP) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan salah satu contoh wilayah homogen, sedangkan Kapet dan segi tiga pertumbuhan merupakan contoh wilayah nodal.

7) Jawab D

Wilayah merupakan area yang menjadi bagian dari wilayah nasional yang memiliki struktur yang komprehensif dan memiliki ciri khusus serta merupakan media dari berbagai aktivitas kegiatan untuk berlokasi dan berinteraksi.

- 8) Jawab A
Meskipun suatu wilayah dapat dikatakan sebagai suatu daerah yang berdiri sendiri (*independent*), tetapi dalam kenyataannya setiap daerah pasti akan berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
- 9) Jawab D
Pembentukan wilayah di Indonesia baik itu wilayah kota/kabupaten maupun wilayah provinsi lebih didasari atas adanya kebijakan pemerintah (pembentukan wilayah didasari atas UU), yang berarti selalu didasarkan atas pengertian wilayah administratif atau wilayah perencanaan
- 10) Jawab B
Spillover effect didefinisikan sebagai adanya penambahan aktivitas yang berasal dari luar wilayah ekonomi. Adanya perkembangan prasarana pusat perbelanjaan di wilayah Bodetabek dan prasarana pendukung industri di Sidoarjo merupakan contoh dari adanya *spillover effect* karena ternyata prasarana tersebut dirasakan oleh wilayah yang lebih besar dari wilayah ekonomi yang ada (yaitu wilayah administratif).

Tes Formatif 3

- 1) Jawab D
Sistem aturan yang sama (baik dari sisi mata uang, aturan perdagangan, dan bea cukai), tidak adanya hambatan masuk untuk perdagangan antar daerah menyebabkan perdagangan antar daerah menjadi relatif lebih mudah dibandingkan dengan perdagangan antar negara. Oleh sebab itu, daerah biasanya memiliki tingkat keterbukaan yang lebih besar dibandingkan dengan nasional.
- 2) Jawab C
Neraca modal daerah adalah suatu data statistik yang mengukur arus modal masuk (*capital inflow*) dan arus modal keluar (*capital outflow*) di suatu daerah dalam selang waktu tertentu.
- 3) Jawab C
Variabel nasional yang tidak berpengaruh pada analisis wilayah adalah nilai *kurs* (nilai tukar mata uang), karena analisis wilayah menggunakan satu mata uang saja, yaitu mata uang domestik

4) Jawab A

Pendekatan perhitungan pendapatan wilayah yang belum bisa dilakukan oleh provinsi adalah perhitungan pendapatan wilayah dengan pendekatan pendapatan (*income approach*), karena belum tersedia data mengenai seberapa besar bahagian pendapatan wilayah yang berasal dari upah pekerja, pendapatan para pemilik modal, dan pendapatan para pemilik sumber daya alam.

5) Jawab B

Cara termudah untuk mengukur derajat keterbukaan suatu daerah adalah dengan menghitungnya berdasarkan rumus sebagai berikut

$$Openness = \frac{X + M}{GDP}$$

Di mana:

X = Besarnya ekspor wilayah tersebut

M = Besarnya impor ke wilayah tersebut

PDRB = Besarnya barang dan jasa final yang dihasilkan

6) Jawab A

Kegunaan utama dari neraca pembayaran adalah untuk mengetahui:

- arus barang, jasa, dan modal yang keluar masuk antar daerah;
- dapat mengukur pergerakan sumber daya antar daerah;
- mengetahui derajat keterbukaan dari masing-masing daerah;
- mengidentifikasi adanya surplus atau defisit yang dialami oleh suatu daerah.

7) Jawab C

Hingga saat ini di Indonesia tidak bisa membuat neraca daerah, karena sistem statistik antar daerahnya tidak memungkinkan untuk mencatat hal tersebut. Begitu juga dengan neraca arus dana, sistem perbankan di Indonesia tidak mengenal adanya sistem perwilayahan bank.

8) Jawab B

Perdagangan antar daerah lebih mudah dilakukan karena:

- dalam pergerakan arus komoditi antar wilayah tidak ada hambatan perdagangan, misalnya tarif, pajak ekspor atau pajak impor;
- aktivitas perdagangan antar daerah tidak memerlukan adanya *exchange control* karena masih berada dalam sebuah negara;
- perdagangan internasional biasanya juga dipengaruhi oleh hambatan-hambatan administrasi.

9) Jawab D

Berbagai alternatif penggunaan tabel *input-ouput* wilayah di antaranya adalah

- a. dapat menggambarkan hubungan aktivitas antar berbagai sektor perekonomian yang ada di daerah;
- b. dapat menggambarkan keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan penyedia *input*.
- c. bisa mengetahui *multiplier effect*;
- d. bisa dijadikan analisis antar aktivitas ekonomi dan penyediaan *input*.

10) Jawab B

Komponen neraca pembayaran terdiri atas 3 neraca, yaitu

- a. neraca perdagangan, yang mengukur perkembangan arus keluar masuk barang-barang antar daerah;
- b. neraca jasa, yang mengukur perkembangan arus keluar masuk jasa-jasa antar daerah;
- c. neraca modal, yang mengukur arus modal masuk (*capital inflow*) serta arus modal keluar (*capital outflow*) antar daerah.

Glosarium

- Kawasan Perkotaan** : Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- Multiplier effect* : Dampak berganda dari adanya tambahan pada satu aktivitas ekonomi terhadap aktivitas perekonomian secara keseluruhan.
- Neraca arus dana** : Suatu neraca yang memberikan informasi mengenai aliran dana dari suatu daerah ke daerah lain dalam suatu negara. Biasanya pergerakan dana ini akan terlihat dari transfer dana antar bank
- Neraca Produksi** : Neraca yang disusun untuk mengukur besarnya produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah
- Spillover effect* : Sering juga disebut sebagai eksternalitas, yaitu suatu penambahan aktivitas yang berasal dari luar wilayah ekonomi. Tambahan aktivitas tersebut bisa berpengaruh positif atau juga negatif bagi suatu wilayah
- Wilayah** : Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- Wilayah homogen** : Suatu wilayah yang memiliki suatu kesamaan karakteristik tertentu, seperti struktur penduduk yang sama, sumber daya dan lingkungan alam yang sama, aktivitas ekonomi yang sama, dan lain-lain.
- Wilayah nodal** : Sering juga disebut sebagai wilayah ekonomi dengan ciri utama adanya kecenderungan aktivitas wilayahnya terpusat pada satu kegiatan yang dominan di wilayah tersebut. Contoh wilayah ini diantaranya adalah kawasan metropolitan.

Wilayah perencanaan/ administratif : Daerah yang terbentuk karena adanya kebijakan politis dari pemerintah. Biasanya bentuk wilayahnya berupa batas-batas administratif, seperti kabupaten, kota atau provinsi

Daftar Pustaka

- Bendavid-Val, Avrom. (1991). *Wilayah and Local economic Analysis for Practitioners*. 4th Edition. Praeger Publishers.
- Blakely, Edward J. (1989). *Planning Local economic Development Theory and Practice*. Sage Publications.
- Isard, Walter, et al. (1960). *Methods of Regional Analysis: an Introduction to Regional Science*. The Massachusetts Institute of Technology.
- McCann, Philip. (2001). *Urban and Regional Economics*. Oxford University Press.
- Muljarijadi, Bagdja (1999). *Diktat Ekonomi Perencanaan*. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- Muljarijadi, Bagdja (2000). *Diktat Ekonomi Wilayah*. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- Nugroho, Iwan & Dahuri, Rokhmin. (2004). *Pembangunan Wilayah Perspektif ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES.
- Sutriah, Siti (1984). *Diktat Pengantar Pengembangan Wilayah*. Departemen Planologi ITB.